

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA KABUPATEN/KOTA HASIL PEMEKARAN DI PROVINSI SUMATERA

Zahwa Azzhara Deanti; Junaidi; Parmadi
Prodi Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi
Email: zahwazzhara@gmail.com

Abstract

Income inequality is one of the regional economic development issues still faced by newly formed regencies/cities in Indonesia, particularly on the island of Sumatra. Regional expansion is expected to accelerate equitable development, but in practice, it has not been able to fully reduce inter-regional inequality. This study aims to: 1) find out the conditios of poverty, education, infrastructure and income inequality in district and cities in Sumatera. 2) analyze the factors influencing income inequality in newly formed regencies/cities on the island of Sumatra. The data used are panel data from 59 regencies/cities during the 2019-2023 period sourced from the Central Statistics Agency (BPS). The analytical method used is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach, which was selected based on the results of the Chow and Hausman tests. The results show that poverty has a positive and significant effect on income inequality, education has a negative and significant effect, while infrastructure has no significant effect on income inequality. These results indicate that differences in characteristics between newly formed regions remain a major factor in determining the level of income inequality. Therefore, regional development policies need to be more focused on strengthening local economic capacity to reduce inter-regional income inequality.

Keywords: Income Inequality, Poverty, Education, Infrastructure

Abstrak

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan pembangunan ekonomi daerah yang masih dihadapi oleh kabupaten/kota hasil pemekaran di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Pemekaran wilayah diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu menekan ketimpangan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kondisi kemiskinan, pendidikan, infrastruktur dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota hasil pemekaran di Sumatera. 2) Serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota hasil pemekaran di Sumatera. Data yang digunakan merupakan data panel dari 59 kabupaten/kota selama periode 2019-2023 yang bersumber dari Badan Pusat

Article history

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), yang dipilih berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan infrastruktur tidak berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan karakteristik antar daerah hasil pemekaran masih menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: *Ketimpangan Pendapatan, Pemekaran Wilayah, Data Panel, Pulau Sumatera*

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan struktural yang sering muncul dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Di Indonesia, kebijakan pemekaran wilayah bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa pemekaran wilayah tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kabupaten/kota hasil pemekaran yang cukup besar. Perbedaan kapasitas fiskal, struktur ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia antar daerah hasil pemekaran berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan.

Penelitian-penelitian mengenai ketimpangan pendapatan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hindun et al. (2019) , Ersad et al. (2022) , Ayu et al. (2012), May et al. (2020), Nisa et al. (2020), Caesarisma & Hamrullah (2023), Tingkat kemiskinan terbukti menjadi salah satu determinan ketimpangan pendapatan. Kemudian Suryadinata et al. (2023), menunjukkan adanya pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian oleh Sukwika (2018) dan (Ferdian Fiki Tio & Sari, 2024), menyatakan bahwa infrastruktur juga merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota hasil pemekaran di Pulau Sumatera selama periode 2019-2023.

TINJAUAN PUSTAKA

TEORI KETIMPANGAN PENDAPATAN

Ketimpangan pendapatan mencerminkan ketidakseimbangan distribusi pendapatan antarindividu atau antarwilayah. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini, yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1 dan ketentuan khusus lainnya. Menurut Hipotesis U terbalik (*Inverted U Hypothesis*) tentang ketimpangan, Hipotesis tersebut menyatakan bahwa kesenjangan pendapatan cenderung naik pada awal pertumbuhan ekonomi, namun akan berkurang setelah perekonomian mencapai tahap yang lebih maju. Proses pembangunan di negar-negara berkembang dimulai pada tahap yang lebih lambat, Peluang yang tersedia biasanya dimaksimalkan oleh wilayah yang sudah berkembang dengan akses ekonomi yang lebih unggul. Sementara itu, daerah yang masih tertinggal sering kali tidak mendapatkan manfaat peluang tersebut Karena keterbatasan infrastruktur dan rendahnya mutu sumber daya manusia.

TEORI KEMISKINAN

Teori Vicious Cycle of Poverty. Teori ini menegaskan bahwa kemiskinan membentuk lingkaran sulit diputus, sehingga negara miskin tetap terjebak dalam keterbelakangan pembangunan. Misalnya, kurangnya investasi dan pendapatan rendah saling memengaruhi. Rendahnya produktivitas berkontribusi pada pendapatan yang minim, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Dari sudut pandang filosofis, kemiskinan terdiri atas dua bentuk, yakni relatif dan absolut. Kemiskinan relatif ditentukan oleh standar hidup subjektif secara lokal, sedangkan kemiskinan absolut berkaitan dengan standar minimum kebutuhan dasar. Garis kemiskinan merupakan ukuran standar minimum tersebut.

a. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif muncul akibat ketimpangan pembangunan dan sangat dipengaruhi oleh distribusi pendapatan atau pengeluaran, terutama bagi 20%-40% penduduk berpenghasilan terendah.

b. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan seseorang mencapai standar hidup minimum menurut garis kemiskinan resmi. Adapun indikator dari kemiskinan sebagai berikut: Head Count Index, Poverty Gap Index dan Poverty Severity Index

TEORI PENDIDIKAN

Teori ini dikenal dengan “Human Capitally” yang dipelopori oleh Gary Becker dan Theodore Schultz tahun 1960. Menurut teori ini menjelaskan bahwa orang yang menginvestasikan waktu dan usaha dalam pendidikan serta keterampilan akan memiliki keunggulan di pasar kerja. Becker menyatakan bahwa individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik dan dengan demikian memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pendidikan yang memadai. Menurut Wahyuni & Monika (2016), hal ini mengindikasikan bahwa individu yang memiliki keterampilan lebih tinggi atau Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pengembalian yang diperoleh dari pendidikannya. Berdasarkan BPS (2023) Indikator dari pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Sekolah.

TEORI INFRASTRUKTUR

Menurut Myrdal (1957) dalam jurnal Sri Hartati (2022) menyatakan dalam teorinya bahwa ketimpangan anatar wilayah akan semakin besar jika pembangunan hanya terpusat di wilayah tertentu, karena terjadi arus modal, tenaga kerja dan teknologi ke wilayah yang sudah maju. Pembangunan infrastruktur secara merata dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan menciptakan kesempatan yang setara, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

KONSEP PEMEKARAN WILAYAH

Pemekaran wilayah merupakan pembentukan daerah otonom baru yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan ekonomi dan kelembagaan daerah

METODOLOGI PENELITIAN

DATA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel 59 kabupaten/kota hasil pemekaran di Pulau Sumatera selama periode 2019-2023. Variabel dependen adalah ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini, sedangkan variabel independen meliputi

Metode Analisis Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Model yang terpilih kemudian diuji dengan uji asumsi klasik serta uji signifikansi parameter.

$$Y = \beta_{0it} + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana

Y = Unit cross section ke-i periode waktu ke-t.

β_0 = Intercept.

β_k = Koefisien slope untuk semua unit.

X_{it} = Variabel prediktor untuk unit cross section ke-i periode waktu ke-t.

e_{it} = Galat atau komponen error pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

i = Unit cross section (1, 2, 3, ..., N).

t = Unit time series (1, 2, 3, ..., T).

k = Jumlah variabel prediktor (1, 2, 3, ..., n).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL ANALISIS REGRESI DATA PANEL

Untuk mendapatkan model pengujian data yang tepat, maka dapat dilakukan tiga tahap pengujian yaitu uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hasil pengujian sebagai berikut

Tabel 1 Hasil uji Chow

Effect Test	Statistic	Prob
Cross- section F	8.378043	0.0000
Cross-section Chisquare	332.382603	0.0000

Sumber : Hasil Olah data (2025)

Hasil uji Chow pada tabel 1, menunjukkan nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen ($0.00 < 0.05$) berarti model Fixed Effect (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan model Common Effect (CEM).

Tabel 2 Hasil uji Hausman

Test Summary	Statistic	Prob
Cross- section random	10.919186	0.0122

Sumber : Hasil Olah data (2025)

Selanjutnya, pada tabel 2, hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0122 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai dibandingkan Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil kedua uji tersebut, uji Lagrange Multiplier (LM) tidak perlu dilakukan dan model Fixed Effect (FEM) merupakan model yang paling sesuai untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob
C	0.259515	0.036203	7.168392	0.0000
KMSK	0.006207	0.002350	2.640948	0.0088

PNDK	-0.005538	0.002503	-2.213120	0.0279
INFR	-1.22E-07	1.18E-05	-0.010313	0.9918

Sumber : Data Diolah Eviews 12

$$\text{Gini}_{it} = 0.259515 + 0.006207 \text{KSMK}_{it} - 0.005538 \text{PNDK}_{it} - 1.22\text{E}-07 + \mu_{it} \dots (2)$$

Nilai koefisien 0.259515 artinya jika variabel kemiskinan, pendidikan dan infrastruktur dianggap konstan, maka menghasilkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.259515

Nilai koefisien regresi variabel kemiskinan sebesar 0.006207 menandakan bernilai positif yang artinya terdapat hubungan yang searah, jadi setiap kenaikan kemiskinan sebesar 1 % maka akan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0.006207%

Nilai koefisien regresi variabel pendidikan sebesar -0.005538 menandakan koefisien bernilai negatif yang artinya terdapat hubungan yang berbanding terbalik, jadi setiap kenaikan pendidikan sebesar 1 % maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan sebesar -0.005538%

Nilai koefisien regresi variabel infrastruktur -1.22E-07 menandakan koefisien bernilai negatif yang artinya terdapat hubungan yang berbanding terbalik, jadi setiap kenaikan infrastruktur sebesar 1 % maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan sebesar -1.22E-07%

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan agar mengetahui data yang dilakukan analisa telah terdistribusi secara normal atau tidak

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Jarque Bera	1.875068
probability	0.391592

Sumber: Data diolah, Eviews 12

Tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas Jarque-bera sebesar 1.875068 > 0,05 yang sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi normal.

Uji Multikolineritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolineritas

Data diolah, Hasil dengan korelasi pada dari tabel nilai dari	Correlation			
		KMSK	PNDK	INFR
	KMSK	1.000000	-0.182634	-0.086829
	PNDK	-0.182634	1.000000	0.028821
	INFR	-0.086829	0.028821	1.000000

Sumber:
Eviews 12

uji
multikolineritas
melihat nilai
variabel. Hasil
menunjukkan
masing-masing

variabel lebih kecil dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob
C	0.028573	0.021323	1.340034	0.1815
GINI	0.033450	0.034826	0.957746	0.3392

Tabel 6.

KMSK	-0.001227	0.001272	0.719355	0.3354
PNDK	-0.001686	0.001348	-1.250767	0.2123
INFR	4.53E-06	6.30E-06	-0.965235	0.4726

Hasil Uji

Heterokedasitas

Sumber: Data diolah, Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas semua variabel diatas tingkat signifikansi (0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkam bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedasitas, sehingga asumsi heterokedasitas terpenuhi.

HASIL UJI PARAMETER

Uji T

Tabel 7. Hasil Uji t

No	Variabel	t-staistic	prob
1.	Kemiskinan	2.640948	0.0088
2.	Pendidikan	-2.213120	0.0279
3.	Infrastruktur	-0.010313	0.99918

Sumber: Data diolah, Eviews 12 (2025)

- Untuk variabel kemiskinan sebagai Kemiskinan dengan nilai t-statistic 2,640948 dan nilai probabilitas $0,0088 < 0,05$, maka variabel kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota hasil pemekaran di Sumatera
- Untuk variabel pendidikan sebagai Pendidikan dengan nilai t-statistic -2,213120 dan nilai probabilitas $0,0279 < 0,05$, maka variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota hasil pemekaran di Sumatera
- Untuk variabel infrastruktur sebagai Infrastruktur dengan nilai t-statistic -0,010313 dan nilai probabilitas $0,9918 > 0,05$, maka variabel infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota hasil pemekaran di Sumatera

Uji f

Uji f dilakukan untuk melihat variabel independen secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai probabilitas statistik $< 0,05$ maka variabel independennya secara bersama-sama atau simultan akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas $> 0,05$ yang berarti dengan variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya.

Tabel 8. Hasil Uji F (simultan)

F-staititic	9.158421
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah, Eviews 12 (2025)

Dapat dilihat bahwa F statistik sebesar 9.158421 dengan probabilitas sebesar (0.000000) atau lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5$ persen yaitu ($0.000000 < 0,05$). Artinya secara bersama-sama memiliki penagruh signifikan Kemiskinan, Pendidikan dan Infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota hasil pemekaran di wilayah di provinsi Sumatera.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah mngukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di rentang nilai 0

hingga 1. Nilai R^2 yang kecil berarti menunjukkan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.705683
Adjusted R- squared	0.628630

Sumber: Data diolah, Eviews 12 (2025)

Kondisi kemiskinan, pendidikan, infrastruktur dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota hasil pemekaran di Sumatera

untuk kondisi kemiskinan melihat dari persentase kemiskinan selama periode 2019- 2023 menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun bervariasi antarprovinsi. Aceh dan Bengkulu mencatat tingkat kemiskinan tertinggi dengan 14%, sebaliknya Bangka Belitung memiliki tingkat kemiskinan terendah dibandingkan provinsi lain dengan dibawah 5% sepanjang penelitian. dan provinsi Jambi, Sumatera Barat dan Riau juga menunjukkan tingkat kemiskinan relatif lebih rendah dan stabil.

kondisi pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) di Sumatera selama tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan perbedaan antarwilayah. Aceh dengan nilai RLS tertinggi yaitu 9,7 tahun, diikuti dengan Riau, Sumatera Utara dan Sumatera barat dengan RLS diatas 8,5 tahun. Sementara itu, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Sumatera Selatan berada pada tingkat menengah dengan nilai berkisar 8,1 hingga 8,7 tahun. Kepulauan Riau dan Bangka Belitung masih memiliki nilai RLS yang lebih rendah dan terindikasi keterbatasan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah.

Infrastruktur jalan di Sumatera memiliki peran yang strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, mengingat luas wilayah dan karakter geografis yang beragam. Namun, panjang dan kualitas jalan antarprovinsi menunjukkan keberagaman yang dipengaruhi oleh geografis. provinsi dengan wilayah terluas seperti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan memiliki jaringan jalan yang lebih panjang, sementara Kepulauan Riau dan Bangka Belitung lebih berfokus pada konektivitas antar pulau.

Kondisi ketimpangan pendapatan dapat dilihat pada Gini Rasio yang mencakup kabupaten dan kota hasil pemekaran di Sumatera pada periode tahun 2019 hingga 2023 berada dikisaran 0,21-0,33 yang berarti tingkat ketimpangan pendapatan tergolong kategori rendah hingga menengah. Secara umum, Sebagian besar provinsi mencatat nilai Gini rasio di sekitar angka 0,28-0,31 dengan Sumatera Selatan, Riau dan Lampung termasuk wilayah dengan tingkat ketimpangan relatif tinggi. Sementara itu, Bangka Belitung secara konsisten memiliki nilai Gini Rasio terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap ketimpangan Pendapatan Di Kabupten/Kota Hasil Pemekaran Wilayah Di Provinsi Sumatera

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota hasil pemekaran di Provinsi Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan cenderung memperlebar ketimpangan pendapatan antarwilayah. Daerah dengan persentase penduduk miskin yang tinggi memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi, sehingga pendapatan hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hindun et al. (2019) dan Ersad et al. (2022) yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang memperbesar ketimpangan pendapatan

Analisis Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupten/Kota Hasil Pemekaran Wilayah Di Provinsi Sumatera

Variabel pendidikan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di daerah hasil pemekaran. Pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peluang kerja, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Hasil ini mendukung teori modal manusia serta sejalan dengan penelitian Suryadinata et al. (2023) dan Hindun et al. (2019) yang menemukan bahwa pendidikan berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan

Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap ketimpangan Pendapatan Di Kabupten/Kota Hasil Pemekaran Wilayah Di Provinsi Sumatera

Hasil estimasi menunjukkan bahwa infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota hasil pemekaran di Pulau Sumatera. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur yang ada belum mampu memberikan dampak langsung terhadap pemerataan pendapatan. Hal tersebut diduga karena pembangunan infrastruktur di daerah hasil pemekaran masih belum merata atau belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ferdian Fiki Tio dan Sari (2024) yang menyatakan bahwa infrastruktur tidak selalu berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan pendidikan merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota hasil pemekaran di Pulau Sumatera. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu wilayah, maka ketimpangan pendapatan cenderung meningkat. Kondisi ini mencerminkan belum terdistribusi pendapatan secara merata serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi. Sedangkan pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan bahwa peningkatan kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat berperan penting dalam menekankan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, infrastruktur tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan di wilayah hasil pemekaran belum sepenuhnya mampu memberikan dampak langsung terhadap pemerataan pendapatan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengurangan ketimpangan pendapatan di wilayah hasil pemekaran di kabupaten/kota pada provinsi Sumatera perlu lebih difokuskan pada kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, I., Riani, P., & Pudjihardjo, D. M. (2012). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pendapatan per kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan Antarwilayah di provinsi Papua. *Jurnal Bumi Lestari*, 12(1), 137-138. <https://www.researchgate.net/publication/277765912>
- Ersad, M., Amri, ;, & Zulgani, A. ; (2022). Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 2684-7868.
- Ferdian Fiki Tio, & Sari, Y. P. (2024). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera*. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/login>
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*, edisi 9. . : Badan Penerbit UNDIP

- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- May, W., Sari, W., & Zaini Putri, D. (2020). Analisis Korelasi antara Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 90-97. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains>
- Nisa, K., Wulandari, A., & Rahayu, R. L. (2020). Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. *Sorot : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 55-63. <https://doi.org/10.31258/sorot.15.1.55-63>
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Suryadinata, D. M., Sahrul Bahtiar, N., Hidayah, A. N., & Sholihah, A. (2023). Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesenjangan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains*, 2(2), 159-170.
- Wahyuni & Monika. (2016). Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Di Indonesia (the Impact of Education on Income Inequality Among Indonesian Workers). *Juni*, 11(1), 15-28.